



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
BUM DESA TIRTA MANDIRI (STUDI KASUS DESA
PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN
KLATEN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Lisa Mustika Wulandari

NIM: 3312415045

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 September 2019

Pembimbing Skripsi



Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M.
NIP. 197207242000031001

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan PKn



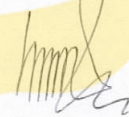
Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 197610112006041002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 5 September 2019



Lisa Mustika Wulandari
NIM. 3312415045




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2019

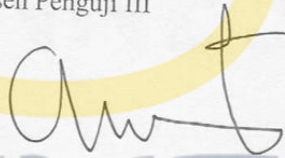
Penguji I


Dr. Sunarto, S.H., M.Si
196306121986011002

Penguji II


Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom
198502072014042001

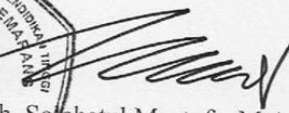
Dosen Penguji III



Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M
19720724200003001

Mengetahui:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Dr. Moh. Soehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Once you beat your nervous, you will have it all. Be fearless Lisa”.

PERSEMBAHAN

1. Bapak, Ibu, dan Dek Andre Bayu yang menjadi *support system* yang tiada henti menyemangati dan merapalkan doa-doa terbaiknya bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
2. Teman-teman saya di Universitas Negeri Semarang, keluarga KIFS 2015, ERC 2015, dan Program Studi Ilmu Politik 2015.
3. Untuk siapapun yang menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam mengenyam pendidikan. Terima kasih telah berjuang bersama-sama.

PRAKATA

Rasa syukur yang tidak terkira atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri (Studi Kasus Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten). Skripsi dapat terselesaikan berkat adanya saran, bimbingan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Mohammad Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang;
3. Mohammad Aris Munandar, S.Sos., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersabar dalam memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Dr. Sunarto, S.H., M.Si selaku dosen penguji I yang telah bersedia memberikan masukan serta mengarahkan penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
5. Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom selaku dosen penguji II yang telah bersedia memberikan masukan serta mengarahkan penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah membagikan ilmunya selama masa studi penulis;

7. Seluruh staf dan karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang;
8. Junaedhi Mulyono selaku Kepala Desa Ponggok yang inovatif dan menginspirasi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Desa Ponggok;
9. Joko Winarno selaku Direktur BUM Desa Tirta Mandiri yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan tentang berdesa melalui badan usaha desa;
10. Informan penelitian lainnya: Mba Nurul, Mba Sari, Bapak Triyono selaku Ketua Pokdarwis, Ketua UKM Ibu Lis, dan masyarakat Desa Ponggok yang bersedia meluangkan waktu kepada penulis dan memberikan informasi terkait penelitian penulis;
11. Untuk sahabat-sahabatku ‘Pengukir Peradaban’ yang selalu *men-support* penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih selalu ada pada saat kondisi penulis *ups and downs*;
12. Untuk keluarga Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Sosial (KIFS). Terima kasih telah menjadi teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan;
13. Untuk keluarga ERC (*English Research Community*) yang selalu menjadi semangat penulis untuk mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan. Terima kasih karena selalu menginspirasi penulis;
14. Teman-teman satu angkatan di program studi Ilmu Politik UNNES 2015.

Dengan segala dukungan dan doa-doa yang diberikan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Wulandari, Lisa Mustika. 2019. Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri: Studi Kasus Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. 140 halaman.

Kata Kunci: BUM Desa, *Community Development*, Partisipasi Masyarakat

BUM Desa merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan pula hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Hadirnya BUM Desa Tirta Mandiri sejak tahun 2009 mampu mengubah Desa Ponggok menjadi desa berpendapatan asli desa tinggi: tahun 2018 mencapai Rp 1.184.900.000,00. Pencapaian tersebut tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa. Maka, tujuan penelitian ini dilakukan untuk: 1) mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa terhadap BUM Desa Tirta Mandiri, 2) untuk mengetahui aktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap BUM Desa Tirta Mandiri yang pertama, pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih berada pada tahapan tangga *informing* tingkat *tokenisme* (kadar hadiah). Kedua, tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tersalurkan secara kelompok dengan prinsip *community development*. Terjadi sinergi antara BUM Desa dengan Pokdarwis dan Kelompok UKM. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat telah masuk pada tahapan kerjasama (*partnership*) tingkat kadar kedaulatan rakyat (*citizen power*). Ketiga, tahap pengambilan manfaat, masyarakat mendapatkan manfaat dengan kehadiran BUM Desa yang bersinergi dengan Pokdarwis dan PKK. Keempat, pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat berada pada tahapan *informing* tingkat manipulasi (*manipulation*).

Saran dalam penelitian yaitu perlu ada penguatan dari pemerintah desa untuk menumbuhkan keinginan dan kemampuan masyarakat desa yang belum tergabung dalam kelompok masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dan berinovasi dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (*Community Based Resource Management*). Pemerintah desa dan pihak BUM Desa Tirta Mandiri perlu mengembangkan iklim yang transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan-kegiatan BUM Desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu lebih gencar menciptakan ruang-ruang informal yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang di hadapi.

ABSTRACT

Wulandari, Lisa Mustika. 2019. Citizen Participation Towards BUM Desa Tirta Mandiri: Case Study Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Advisor Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. 140 pages.

Key Words: BUM Desa, Citizen Participation, Community Development

BUM Desa is a village business characterized by collective ownership, not only owned by the village government, not only owned by the community, it is not only owned by individuals, but belongs to the village government and the community. The presence of BUM Desa Tirta Mandiri since 2009 has been able to turn Ponggok Village into a high-income village with a village high: in 2018 it reaches Rp. 1,184,900,000.00. This achievement is inseparable from the participation of the village community. So, the purpose of this research is to: 1) find out how the participation of the village community in BUM Desa Tirta Mandiri, 2) to find out what factors encourage the community to participate.

The research method used is a qualitative method with data collection techniques through: observation, in-depth interviews, and documentation. The researcher used qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that community participation in BUM Desa Tirta Mandiri was first, at the planning stage, community participation was still at the stage of the informational level of tokenism (prize level). Second, the implementation phase, community participation is channeled in groups with the principle of community development. There is a synergy between BUM Desa and Pokdarwis and the UKM Group. In this case, community participation has entered the level of citizen power. Third, the stage of taking benefits, the community benefits from the presence of BUM Desa in synergy with Pokdarwis and PKK. Fourth, at the supervision stage, community participation is at the stage of informing the level of manipulation.

Suggestions in research are that there needs to be strengthening of the village government to foster the desires and abilities of rural communities who have not joined the community group so that the community participates and innovates in Community Based Resource Management. The village government and the BUM Desa Tirta Mandiri party need to develop a climate of transparency and accountability in all BUM Desa activities. In addition, the village government also needs to be more aggressive in creating informal spaces that are adapted to the conditions of the people faced.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Batasan Istilah	
1.5.1 Partisipasi Masyarakat	8
1.5.2 Pengelolaan	9
1.5.3 BUM Desa	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	10
2.2 Faktor-faktor Pendukung Partisipasi	16
2.4 Motivasi Partisipasi	19
2.5 Cara Membangkitkan Partisipasi	
2.6 Derajat Partisipasi	26
2.2 Pengelolaan BUM Desa	31
2.3 Penelitian Terdahulu	42
2.4 Kerangka Berpikir	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Latar Penelitian	50
3.2 Fokus Penelitian	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data	52
3.4 Uji Keabsahan	55
3.5 Teknik Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

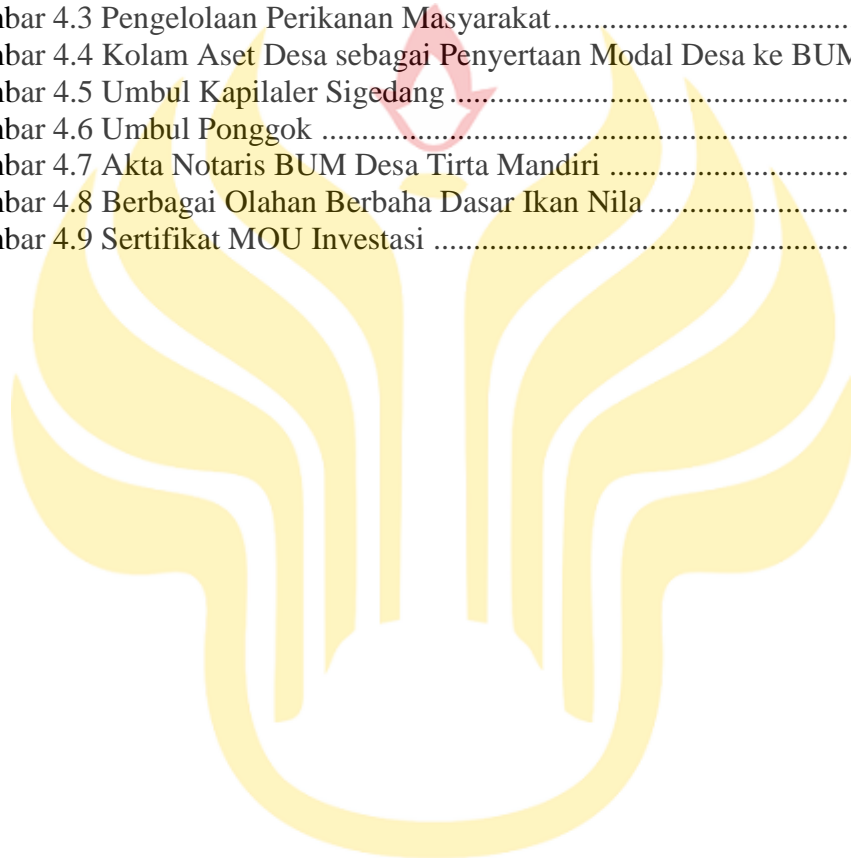
4.1 Deskripsi Umum BUM Desa Tirta Mandiri	58
4.2 Hasil Penelitian	60
4.2.1 Kegiatan-kegiatan Usaha BUM Desa	60
4.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat	72
4.2.3 Faktor-faktor Partisipasi Masyarakat	
4.4 Pembahasan	107

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran	126

DAFTAR GAMBAR

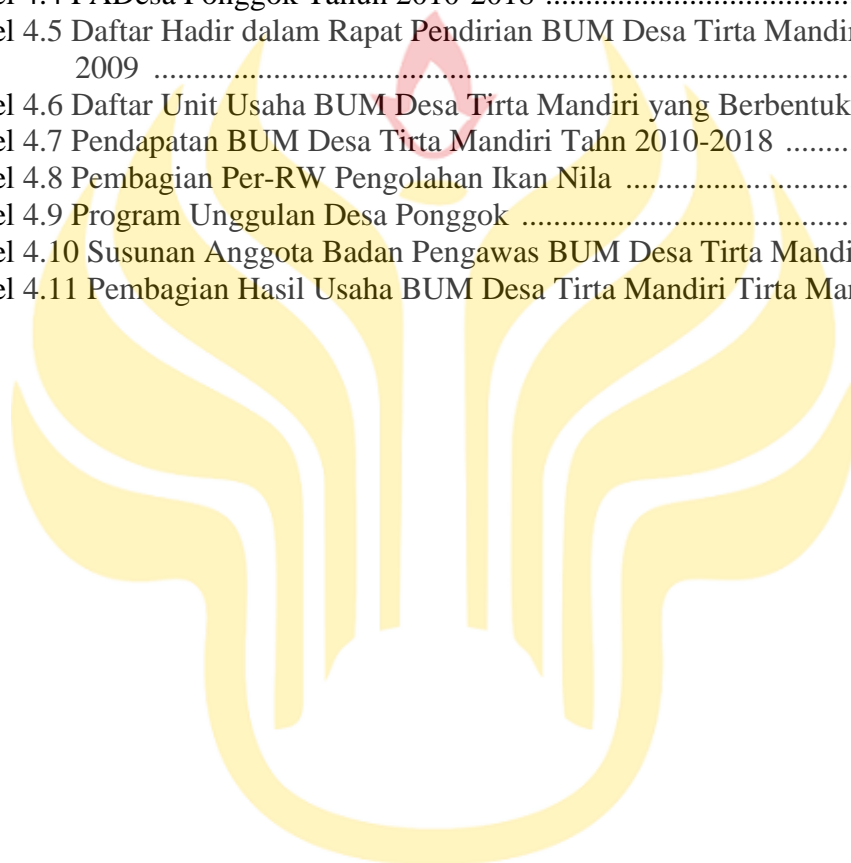
Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Arstein 1969	27
Gambar 2.2 Derajat Partisipasi Wilcox (1987)	29
Gambar 3.1 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data	57
Gambar 4.1 Analisis Potensi Desa Ponggok	60
Gambar 4.2 Website Desa Ponggok	69
Gambar 4.3 Pengelolaan Perikanan Masyarakat	70
Gambar 4.4 Kolam Aset Desa sebagai Penyertaan Modal Desa ke BUM Desa ...	77
Gambar 4.5 Umbul Kapilaler Sigedang	82
Gambar 4.6 Umbul Ponggok	84
Gambar 4.7 Akta Notaris BUM Desa Tirta Mandiri	86
Gambar 4.8 Berbagai Olahan Berbahan Dasar Ikan Nila	89
Gambar 4.9 Sertifikat MOU Investasi	94



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri	58
Tabel 4.2 Tahapan Pembangunan Desa Pongkok	65
Tabel 4.3 Grafik Jumlah Pengunjung Umbul Pongkok Tahun 2012-2016	69
Tabel 4.4 PADesa Pongkok Tahun 2010-2018	70
Tabel 4.5 Daftar Hadir dalam Rapat Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri Tahun 2009	74
Tabel 4.6 Daftar Unit Usaha BUM Desa Tirta Mandiri yang Berbentuk PT	86
Tabel 4.7 Pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri Tahun 2010-2018	88
Tabel 4.8 Pembagian Per-RW Pengolahan Ikan Nila	91
Tabel 4.9 Program Unggulan Desa Pongkok	97
Tabel 4.10 Susunan Anggota Badan Pengawas BUM Desa Tirta Mandiri	101
Tabel 4.11 Pembagian Hasil Usaha BUM Desa Tirta Mandiri Tirta Mandiri	101



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian	140
Lampiran 2 Instrumen Wawancara	145
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	150
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	155
Lampiran 4 Perdes Pongok	160



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BUM Desa merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan pula hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat (Sutoro 2014:20). Jumlah BUM Desa di Indonesia mengalami peningkatan hingga melampaui target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Jokowi-Jusuf Kalla yang semula hanya ditarget 5 ribu BUM Desa di tahun 2014-2019. Sekretaris Jenderal Kemendes, Anwar Sanusi mengatakan jumlah tersebut telah terlampaui menjadi 41 ribu BUM Desa dari 74.957 desa di tahun 2018 ini. (Zuraya, 2018 <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/26/pissvc383-kemendes-jumlah-BUM-Desa-mencapai-41-ribu-unit>, diakses tanggal 12 Februari 2019).

Jumlah BUM Desa di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan, dari total 391 desa sudah terbentuk 219 BUM Desa. Tahun 2010 hingga 2015 sebanyak 68 BUM Desa terbentuk, tahun 2016 sebanyak 77 BUM Desa, 2017 sebanyak 77 BUM Desa, dan 2018 bulan Januari-Juli sebanyak empat BUM Desa. Bupati Klaten, Sri Mulyani melalui sosialisasi perda No. 1 Tahun 2018 mengatakan:

“Saya berharap dari 219 BUM Desa dengan potensi yang ada, bisa dikembangkan, bisa berinovasi dari BUM Desa yang sudah didirikan bisa mensejahterakan masyarakat”. (Kominfo, 2018, klatenbag.go.id, diakses pada 13 Februari 2019)

BUM Desa Tirta Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Desa Ponggok. BUM Desa yang berlokasi di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten tersebut berdiri pada tahun 2009 berlandaskan peraturan Desa Ponggok No. 6 Tahun 2009. Sejak tahun 2015 BUM Desa Tirta Mandiri berpendapatan 6,1 miliar, tahun 2016 pendapatan mencapai 10,3 miliar, tahun 2017 meningkat menjadi 14,2 miliar (Mata Najwa 2018). Dengan demikian, pendapatan BUM Desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yakni untuk menjalankan program-program unggulan desa seperti: (1) beasiswa satu rumah satu sarjana, (2) memperbaiki rumah, sanitasi, dan air bersih, (3) perlindungan sosial bagi lansia, dan (4) perlindungan kesehatan melalui kartu jamkesdes.

Peneliti tertarik untuk meneliti BUM Desa Tirta Mandiri. Sebab sebelum berdirinya BUM Desa Tirta Mandiri di tahun 2009, Desa Ponggok pada tahun 2001-2004 merupakan desa tertinggal. Kepala Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono mengatakan bahwa pada tahun-tahun tersebut kondisi masyarakat desa Ponggok terlilit hutang rentenir dan menjadi pengangguran (Kemendes PDTT 2017). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 menyebutkan bahwa Kepala Desa dalam tugasnya berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok bersama dengan lembaga desa dan perwakilan masyarakat desa mendirikan BUM Desa Tirta Mandiri sebagai penggerak ekonomi desa.

Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono dalam tayangan Mata Najwa (2018) mengatakan bahwa Desa Ponggok memiliki lima aset desa yakni sumberdaya alam, sumberdaya manusia, aset sosial, aset infrastruktur, dan aset

finansial. Aset desa tersebut dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset desa meliputi penggunaan dan pemanfaatan yang di atur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono bahwa:

“Desa Ponggok adalah desa yang mana secara potensi alam memiliki air yang melimpah, tetapi belum dimanfaatkan, belum digali semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat” (Wawancara Najwa Shihab dengan Kepala Desa Ponggok dalam acara TV Mata Najwa, 24 Oktober 2018)

Dalam proses menggali potensi desa, Kepala Desa Ponggok menggandeng mahasiswa KKN UGM. Letak geografis kabupaten Klaten yang strategis diantara dua Gunung berapi yakni Merapi dan Merbabu membuat Desa Ponggok kaya akan sumber mata air. Bahkan air mengalir ke selatan ke Kecamatan Karangnom dan ke timur sampai Kecamatan Ceper (Merauje 2017:19). Kondisi air yang melimpah tersebut, hanya digunakan masyarakat untuk irigasi dan kebutuhan mencuci setiap hari. Namun melalui KKN UGM, Desa Ponggok dapat menemu kenali dan memanfaatkan potensi sumber mata air tersebut.

Ada empat tempat sumber mata air di Desa Ponggok yakni sumber air Umbul Ponggok, Umbul Ciblon, Umbul Manten Dan Umbul Besuki. Dengan aset desa berupa mata air tersebut, BUM Desa dapat mengelola aset desa melalui penyertaan modal sesuai Permendagri Pasal 4 Ayat 2. Sumber mata air Desa Ponggok dikelola untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata air. Umbul Ponggok menjadi obyek wisata air dengan jumlah wisatawan yang berkunjung hingga 40 ribu orang per bulan (Mata Najwa, 2018). Selain obyek wisata air, pemanfaatan air juga digunakan untuk mengembangbiakkan budidaya ikan nila. Sekretaris BUM

Desa Tirta Mandiri mengatakan bahwa satu kali panen dapat menghasilkan sejumlah 1 ton ikan (wawancara dengan Mba Sari pada tanggal 4 Februari 2019).

Ada beberapa unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa Tirta Mandiri dan telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Permendes No. 4 Tahun 2015 Bab III Pasal 8 mengatur bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha sebagai Perseroan Terbatas (PT). Pembentukan PT tersebut hanya untuk memudahkan administrasi BUM Desa dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, dibentuknya PT tersebut tidak membatasi keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa Ponggok No 6 Tahun 2009 Pasal 2 bahwa pembentukan badan usaha desa dikelola oleh pemerintah desa bersama lembaga desa dan warga desa.

Unit usaha BUM Desa Tirta Mandiri yakni: jasa simpan pinjam, toko desa, persewaan gedung, obyek wisata air, *home stay*, perikanan, kios kuliner, *wedding organizer* beserta katering, dan pengelolaan air minum. Pada tahun 2014, unit-unit usaha desa tersebut dibentuk PT yakni: 1) pariwisata (Umbul Ponggok) yang digerakkan oleh PT Umbul Ponggok, 2) perkreditan/Simpan-Pinjam yang digerakkan oleh PT Arta Tirta, 3) pengelolaan Air Bersih yang digerakkan oleh PT Air Ponggok, 4) perikanan/Kolam yang digerakkan oleh PT Mina Tirta Mulia, 5) kios Kuliner yang digerakkan oleh PT Ponggok Ciblon yang meliputi *resort*, kuliner, *play ground*, dan *water park* (Purnomo, 2018).

Pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri bukan hanya mewedahi usaha perekonomian desa namun juga sebagai implikasi dari pendekatan pemberdayaan masyarakat. Soetomo (2018:69) mengatakan bahwa kehadiran pemberdayaan

masyarakat menjadi sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal untuk berpartisipasi mengelola proses pembangunan. Sehingga tujuan badan usaha milik desa untuk meningkatkan perekonomian desa seperti yang tercantum dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 dapat tercapai apabila ada partisipasi dari masyarakat. Seperti wawancara peneliti dengan staff bagian marketing Umbul Pongkok, Bapak Agus:

“Seluruh masyarakat diberdayakan. Walaupun jumlah karyawan BUM Desa Tirta Mandiri 80 orang. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Umbul pongkok inikan aset desa, ya memang seharusnya dikelola bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.” (wawancara pada tanggal 4 Februari 2019)

BUM Desa sebagai pengelola usaha bersama atau *holding* bersama masyarakat mengembangkan potensi desa dan memberdayakan masyarakat. Dalam setiap bidang usaha yang diwadahi BUM Desa memberikan masyarakat ruang untuk turut mengelola. Hal tersebut seperti hasil wawancara peneliti dengan sekretaris BUM Desa Tirta Mandiri:

“Jelas partisipasi masyarakat ada mbak. Untuk perikanan, yang mengelola dari pokdarwis, untuk menyewa kios warung oleh masyarakat, untuk saham juga warga pongkok, jadi banyak mba...” (wawancara pada tanggal 5 Februari 2019)

BUM Desa memberikan bantuan benih ikan kepada Pokdarwis, dan hasil penjualan dibagi dengan sistem bagi hasil antara Pokdarwis dan BUM Desa Tirta Mandiri. BUM Desa juga menyediakan kios kuliner untuk masyarakat yang ingin berjualan di sekitar obyek wisata Umbul Pongkok dan Umbul Ciblon dan masyarakat dimintai uang Rp 3000 per hari. Penarikan uang tersebut dilakukan jika masyarakat yang bersangkutan sedang berdagang, kalau tidak, maka tidak akan

diminta uang. Keterlibatan masyarakat lainnya yakni investasi 1 KK 5 Juta. Masyarakat yang berkeinginan untuk menanam investasi ke BUM Desa akan mendapatkan pendapatan pasif Rp 300-500 ribu setiap bulan dari bagi hasil pendapatan unit-unit usaha BUM Desa. Untuk menjamin kepercayaan antara BUM Desa dan masyarakat, tiap KK yang berinvestasi akan diberikan MoU sebagai jaminan agar tidak terjadi penyelewengan.

Melalui unit-unit usaha yang dikelola BUM Desa dengan melibatkan masyarakat desa, BUM Desa sebagai *holding* usaha bersama telah berkontribusi meningkatkan perekonomian desa dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Sebuah pencapaian yang besar bahwa pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri dapat mencapai 14 miliar per tahun (Cipto, 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/12/22/11423271/jokowi-desa-pongok-bisa-jadi-contoh-pendapatannya-rp-14-miliar-per-tahun>, diakses 14 Februari 2019). Menariknya, meski pada tahun 2001-2004 menjadi desa tertinggal, semenjak berdiri BUM Desa Tirta Mandiri tahun 2009, masyarakat terlibat secara partisipatif dalam pembangunan desa melalui pengelolaan BUM Desa tersebut. Oleh karenanya hingga berbagai apresiasi diterima oleh Desa Pongok yakni kategori BUM Desa terbaik (*trendy* dan inspiratif) di tahun 2016 dan kategori desa wisata terbaik dalam pemberdayaan masyarakat di tahun 2017. Keberhasilan BUM Desa Tirta Mandiri menjadi BUM Desa terbaik di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan masyarakat yang bersama-sama turut bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung; baik secara individu maupun kelompok. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan

melakukan penelitian berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri Tahun (Studi Kasus Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat mengetahui latar belakang hadirnya partisipasi masyarakat Desa Ponggok terhadap pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri, maka penulis melakukan penelitian dengan latar tempat yakni di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang hendak penulis ajukan yakni:

1. Apa kegiatan usaha yang dilakukan BUM Desa Tirta Mandiri?
2. Apa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian di atas, maka peneliti akan menemukan tujuan yang hendak dicapai dari permasalahan yang telah disajikan di latar belakang. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan BUM Desa Tirta Mandiri.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi khalayak umum, dan menjadi referensi penulisan karya tulis ilmiah serta menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan bagi orang yang ingin mengetahuinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam praktiknya, yakni memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah Desa Ponggok sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri

1.5 Batasan Istilah

1.5.1 Partisipasi Masyarakat

Adisasmita (2006:2) partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Partisipasi masyarakat diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1 yakni dalam perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraannya harus mengikutsertakan masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Pasal 81 Ayat 2). Yang dimaksud peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam skripsi ini yaitu keterlibatan masyarakat Desa Ponggok dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan

yang di mulai dari perencanaan hingga evaluasi, bukan hanya sekadar keterlibatan menikmati hasil pembangunan dari BUM Desa Tirta Mandiri.

1.5.2 Pengelolaan

Moekijat (2000:1) pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Yang dimaksud peneliti pengelolaan dalam skripsi ini yaitu pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri yang dilakukan oleh masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan guna mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pengelolaan juga berarti memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa Ponggok.

1.5.3 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015. BUM Desa yang dimaksud peneliti disini yakni BUM Desa Tirta Mandiri yang dimiliki oleh Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Adisasmita (2006:2) partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Partisipasi berarti “mengambil bagian” atau menurut Hoofsteede “*The taking part in one or more phase of the proses*” partisipasi berarti mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses (Khairuddin 1992:124). Partisipasi juga menjadi salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Namun bukan pula hanya sekedar keterlibatan masyarakat saja. Bukan juga hanya alat mobilisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Melainkan partisipasi sebagai suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Keterlibatan yang diberikan oleh masyarakat bukan hanya aktif secara fisik tetapi juga psikis. Sehingga keterlibatan masyarakat merupakan wujud dari kesadaran mereka untuk menuju ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik (Anwas 2014:92-93). Prasyarat untuk terjadinya partisipasi dalam pembangunan menurut Slamet (1992) dalam Anwas (2014:94) adalah adanya kesempatan, ada kemampuan dan keterampilan, serta ada kemauan dari masyarakat.

Dapat dikatakan pula bahwa partisipasi merupakan salah satu komponen dalam pembangunan masyarakat. Menurut Mubyarto (1984) dalam Kusnaedi (1995:47) partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi dalam pembangunan berarti keterlibatan individu atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan suatu kegiatan pembangunan.

Lebih jelas lagi makna partisipasi dalam pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari (2006) dalam Anwas (2014:93) adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam: (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) keterlibatan dalam pengawasan, (3) keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan, (4) partisipasi sebagai proses pemberdayaan (*empowerment*), (5) partisipasi bermakna kerja kemitraadafn, dan (6) partisipasi sebagai akibat dari pengaruh stakeholder menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan dan penggunaan *resource* yang bermanfaat bagi mereka.

Hal yang sama diungkapkan oleh Adisasmitha (2006:2) partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sedangkan apabila mengacu pada rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), partisipasi dimaknai sebagai pelibatan secara penuh dan aktif berbagai lapisan masyarakat di dalam: (1) proses pengambilan keputusan dalam kerangka

penetapan tujuan pembangunan, dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut, dan (2) pelaksanaan secara sukarela proyek atau program pembangunan (PBB:1975) dalam Ali (2007:67).

Apabila Mubyarto, Adisasmita, Asngari, hingga Rumusan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat bahwa partisipasi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan monitoring/evaluasi kegiatan. Maka Keith Davis (1967) dalam bukunya Khairuddin (1992:124) memberikan pengertian partisipasi sebagai *“as mental and emotional involment of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”*. Ia menggambarkan partisipasi melalui sudut pandang keterikatan emosional seseorang. Pengertian yang diutarakan Keith Davis tersebut setidaknya ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan tentang partisipasi, yaitu:

- 1) Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi
- 2) Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok
- 3) Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok. Adanya kesadaran bahwa seseorang merupakan bagian dari suatu kelompok.

Dengan demikian, partisipasi yang dikemukakan oleh Keith David bukan tentang teknis bagaimana terjadinya partisipasi. Namun cenderung pada keadaan emosional seseorang yang memaknai bahwa partisipasi hendak dilakukan tatkala seseorang terikat secara emosional atas dasar tujuan bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Deepa Narayan tentang

partisipasi yang berkaitan dengan aspek kesukarelaan yakni, bahwa partisipasi merupakan suatu proses sukarela dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (pendapatan, gender, suku, pendidikan) memengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Selanjutnya Korten dalam Khadiyanto (2007) dalam Rodliyah (2013:31) mengemukakan partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diutarakan diatas penulis menyimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat hingga monitoring/evaluasi.

2.1.2 Pengertian Masyarakat

Soekanto (2015:65) mengatakan bahwa dapat dikatakan masyarakat apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar ataupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Kepentingan hidup manusia yakni yang berupa sandang, papan, dan pangan. Sehingga apa yang diuraikan oleh Soekanto (2015) tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Soetomo (2018) yakin masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang berpola, terorganisasi.

Sedangkan Koentjaraningrat (2009:116) masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah “berinteraksi”. Kemudian

Poerwadarminto (1996) dalam Rodliyah (2013:32) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Suparlan (1990) dalam Rodliyah (2013:32) mengatakan bahwa masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilik norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dijabarkan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Mac. Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Manusia merupakan jalinan hubungan sosial. masyarakat akan selalu mengalami perubahan

1. Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengukur diri mereka sendiri sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan dengan jelas
2. J. L Gilin dan J. P Gilin mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang kecil.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan berinteraksi satu sama lain.

2.1.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Bintoro (1989) dalam Rodliyah (2013:33) mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan menurut Eko (2003) partisipasi masyarakat diartikan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memilih hak sipil, politik dan sosial ekonomi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbang inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan tersebut dapat disampaikan melalui rapat masyarakat atau pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota

masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1. Yakni dalam perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraannya harus mengikutsertakan masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Pasal 81 Ayat 2). Soeharto (2015:260) masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa (Pasal 82 Ayat 1).

Dengan demikian, berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dapat dikatakan partisipasi dengan indikasi terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi monitoring. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Cohen dan Uphoff dalam Irene (2009:39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

2.1.4 Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi

Partisipasi terbentuk bukan tanpa sebab. Ada faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya ia ditengah-tengah masyarakat. Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatarbelakanginya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan dan harapan-hrapan yang dirasakan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, dalam hal ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan. Berbeda lagi dengan partisipasi dalam konsep ekonomi. Nurdiyanto (2015) dalam skripsinya, partisipasi hadir dalam konsep ekonomi tatkala besarnya peluang untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Sedangkan Slamet (1994:142-143) dalam bukunya Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keanggotan dan derajat partisipasi, yakni: (1) Usia; (2) pendidikan; (3) penghasilan; (4) pekerjaan; (5) lama tinggal. Dijelaskan dalam bukunya Slamet, bahwa hubungan antara ciri-ciri personal (individu) dengan tingkat partisipasi seperti yang telah disebutkan di atas akan sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan. Faktor-faktor tersebut apabila dijabarkan, yakni (Sapei 2015:29), yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia

menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.1.5 Motivasi Partisipasi

Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri sendiri ataupun orang lain untuk melakukan suatu hal. Menurut Khairuddin (1992:126) ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi anggota masyarakat terjadi karena:

1) Takut/terpaksa

Partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan, sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan

2) Ikut-Ikutan

Berpartisipasi dengan ikut-ikutan, hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat desa. apalagi kalau yang memulai adalah pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat desa (misalnya: gotong-royong)

3) Kesadaran

Motivasi partisipasi yang ketiga adalah kesadaran, yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Partisipasi tersebut dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri

2.1.6 Cara Membangkitkan Partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menggunakan prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principles*), yaitu melalui pendekatan timbal balik manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat. Menurut teori Peter M. Blau bahwa semakin banyak manfaat yang diduga maka semakin kuat pihak itu terlibat dalam kegiatan.
2. Memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial sehingga motivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi.
3. Kegiatan pembangunan harus bersifat dan berfungsi sebagai stimulan yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
4. Rancangan pembangunan harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk melibatkan diri.
5. Menyelaraskan program-program pembangunan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
6. Melibatkan masyarakat dalam membuat suatu rencana dan keputusan.

2.1.7 Macam-Macam Partisipasi

Menurut Nelson L. (1960) dalam bukunya Kusnaedi dkk (1995:47) jenis partisipasi ada dua macam, yakni:

1. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan
2. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi yang dilakukan antara bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara rakyat dengan pemerintah.

Hofsteede (1971:25) dalam Khairuddin (1994:125) juga mengklasifikasikan partisipasi. Ia membaginya dalam teori pembagian partisipasi yakni:

- 1) Partisipasi inisiasi yaitu partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun nonformal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
- 2) Partisipasi legitimasi yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pengambilan keputusan tentang suatu proyek.
- 3) Partisipasi eksekusi yaitu partisipasi pada tingkat pelaksanaan. Masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan proyek, tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan proyek tersebut.

Tingkatan atau tahapan partisipasi menurut Hoofsteede tersebut merupakan implikasi bagaimana demokrasi benar-benar bekerja pada akar rumput. Keterlibatan muncul tanpa paksaan sebagai wujud kesadaran masing-masing orang sebagai masyarakat desa. Melalui kesadaran ini, masyarakat dapat menjalankan perannya dan mengaplikasikan regulasi pemerintah tentang otonomi yang diberikan

kepada desa. Masyarakat dapat menjadi subjek sekaligus obyek dalam pembangunan desa yang dilakukan secara demokratis.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Kusnaedi, dkk. (1995) bahwa sikap positif yang dimiliki masyarakat desa salah satunya adalah, kebebasan berbicara. Masyarakat desa yang pada dasarnya bersifat demokratis. Mereka tidak terikat oleh birokrasi yang berbelit-belit sehingga dengan mudah dapat mengemukakan pendapatnya baik di forum maupun luar forum.

Kemudian oleh Bryant and White (1960) dalam Kusnaedi (1992:49) partisipasi masyarakat antara masyarakat dengan pemerintah dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi politis, yaitu partisipasi dalam proses politis, misalnya pemberian suara dalam pemilihan umum
2. Partisipasi administratif, yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Partisipasi berdasarkan banyaknya yang terlibat, menurut Hungyer dan Heckmen (1967) dibagi menjadi enam jenis, sebagai berikut:

1. Partisipasi individual, yaitu keterlibatan individual dalam keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok
2. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap, dan memberikan tanggapan terhadap informasi
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Menurut Slamet (1994:11) penggolongan partisipasi ada banyak. Diantaranya adalah penggolongan partisipasi berdasarkan pada derajat kesukarelaan:

1. Partisipasi bebas yaitu partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu.
2. Partisipasi terpaksa yaitu partisipasi yang diikuti namun bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.

Di dalam masyarakat ada kemungkinan kecenderungan keanekaragaman tentang siapa yang mengambil keputusan. Pada suatu sisi yang ekstrim hanya ada satu orang yang membuat seluruh keputusan, dalam hal ini disebut **partisipasi nol**. Berkebalikan dengan **partisipasi total**, yakni semua orang berpartisipasi di dalam seluruh keputusan yang diambil (Slamet 1994:33)

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatan. Dibedakan menjadi dua yaitu: partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila seseorang menampilkan diri atau keterlibatannya di dalam pertemuan-pertemuan, diskusi, dan lain sebagainya. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada keterlibatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana. Dalam penggolongan ini ada enam langkah yang hadir dalam partisipasi yakni (1) perumusan tujuan; (2) penelitian; (3)

persiapan rencana; (4) penerimaan rencana; (5) pelaksanaan; dan (6) penilaian. Disebut sebagai partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam dari proses pembangunan terencana. Dan disebut sebagai partisipasi sebagian bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh enam tahap itu.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada tingkatan organisasi. Dusseldorp membedakan partisipasi menurut klasifikasi ini yaitu partisipasi yang terorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasi. Penjelasannya dari keduanya yakni:

1. Partisipasi yang terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan.
2. Partisipasi yang tidak terorganisasi terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang pada umumnya karena keadaan yang gawat seperti misalnya sewaktu terjadi kebakaran, gempa, banjir, atau bencana alam yang lain. Partisipasi yang tidak terorganisir dapat menjadi benih partisipasi yang terorganisir.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan. Ada dua bentuk yakni partisipasi intensif dan partisipasi ekstensif. Dapat dikatakan partisipasi intensif apabila terjadi frekuensi aktivitas partisipatif yang tinggi. Dan dapat dikatakan partisipasi ekstensif terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian (*events*) yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang. Hal demikian ini biasanya terjadi pada organisasi-organisasi yang didasarkan pada

partisipasi sukarela, ada kurun-kurun waktu partisipasi intensif yang diselingi kurun waktu yang panjang dari partisipasi ekstensif. Entah itu berpartisipasi secara intensif ataupun ekstensif, balik lagi bergantung pada biaya dan keuntungan yang diharapkan.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan. Ada dua penggolongan. *Pertama* yakni partisipasi tak terbatas, hal ini terjadi apabila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas tersebut. *Kedua* yakni partisipasi terbatas, terjadi apabila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrasi dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

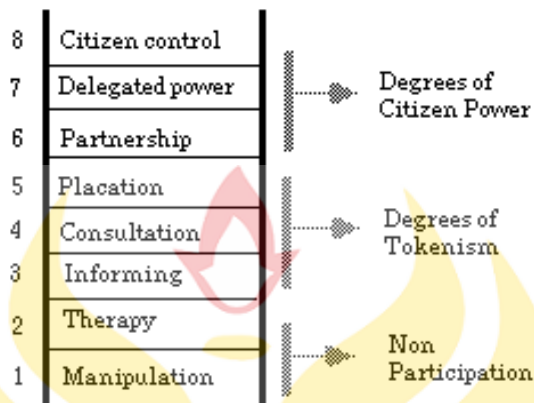
Penggolongan partisipasi berdasarkan pada efektivitas. Digolongkan menjadi dua yakni partisipasi efektif dan tidak efektif. Yang pertama, partisipasi efektif, yaitu kegiatan-kegiatan partisipasi yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. Yang kedua, partisipasi tidak efektif, yaitu hanya sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipatif yang dicanangkan terwujud.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada siapa yang terlibat. Dengan mengklasifikasikan orang-orang yang terlibat yakni (1) anggota masyarakat setempat; (2) pegawai pemerintah; (3) orang-orang luar; (4) wakil-wakil masyarakat yang terpilih. Dengan adanya pengklasifikasian partisipasi dari orang-orang, hal ini membuat partisipasi seolah-olah memiliki sekat untuk siapa kegiatan tersebut diperuntukkan.

Pengelompokan berdasarkan pada gaya partisipasi. Roothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat. Dengan adanya setiap model itu terdapat perbedaan-perbedaan tujuan yang hendak dicapai dan perbedaan dalam gaya partisipasi.

- a. Pembangunan Lokalitas. Model praktek organisasi masyarakat ini sama dengan pembangunan masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini membudayakan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta punya fungsi integratif.
- b. Perencanaan sosial. pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik, dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif. Partisipasi di dalam perencanaan sosial dapat dicirikan seperti yang disebutkan oleh Arnstein sebagai *informing* atau *placation*. Akan tetapi adalah juga mungkin bahwa partisipasi akan berkembang dalam bentuk *partnership* atau perwakilan kekuasaan.
- c. Aksi sosial (*social action*). Tujuan dari tipe partisipasi ini ialah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber. Perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan partisipasi di antara kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-maksud yang penting.

2.1.8 Derajat Partisipasi



Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Arnstein (1969)

Sumber: Sherry R. Arnstein (1969)

Pengelompokkan partisipasi berdasarkan Sherry Arnstein dalam (Ali 2007:68-70) ada tiga jenjang mulai dari yang paling rendah, yakni:

1. Manipulasi/rekayasa sosial, yaitu pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai obyek pembangunan dan dimanipulasi agar sesuai dengan harapan atau program yang telah dirumuskan oleh pengambil keputusan (pemerintah). Masyarakat diikutkan sebagai 'stempel' dalam badan penasihat. Tujuannya adalah dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya (Rodliyah 2013:46);
2. Terapi, yaitu pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa (orang sakit) dan harus percaya terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah (dokter). Pemegang kekuasaan seolah-olah sebagai ahli kesehatan jiwa. Dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan, mereka sebenarnya menganaggap masyarkat sebagai sekelompok yang memerlukan pengobatan. Meskipun

masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukannya menemuka penyebab lukanya (Rodliyah 2013:47);

3. Informasi yaitu pendekatan pembangunan dengan pemberian informasi akan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti pemasyarakatan program. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat;
4. Konsultasi yaitu pendekatan pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkonsultasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dilokasi yang bersangkutan;
5. Penentraman, yaitu pendekatan pembangunan dengan misalnya merekrut tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk dalam panitian pembangunan sebagai upaya menentramkan masyarakat tetapi keputusan tetap di tangan pemerintah;
6. Kerjasama, yaitu pendekatan pembangunan yang mendudukan masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara sehingga keputusan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama;
7. Pendelegasian, yaitu pendekatan pembangunan yang memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengambil keputusan yang langsung menyangkut kehidupan mereka;
8. Kontrol sosial, yaitu pendekatan pembangunan di mana keputusan tertinggi dan pengendalian ada di tangan masyarakat.

Menurut Arnstein, partisipasi baru benar-benar terjadi bila memiliki kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulatan rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial (*social control and citizen control*) dimana keputusan penting dan pengendali pembangunan ada di tangan rakyat.



Gambar 2.2 Tingkat Partisipasi Wilcox 1994

Sumber: David Wilcox (1994)

Artha (2017:37-38) tahapan tangga partisipasi yang merupakan rancangan awal Arnstein kemudian dikembangkan oleh Wilcox yang dibagi dalam lima tahapan untuk mencapai partisipasi masyarakat. Wilcox (1994) membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yaitu pemberian informasi, konsultasi, pembuatan keputusan bersama, melakukan tindakan bersama, dan mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat. Berikut tangga partisipasi Wilcox:

1. Informasi (*information*) merupakan tingkat partisipasi paling rendah. Dalam tingkatan ini dilakukan kegiatan terkait memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai apa yang direncanakan. Sedangkan dalam kegiatan, masyarakat tidak terlibat.

2. Konsultasi (*consultation*). Dalam tingkat partisipasi ini, terjadi umpan balik yang berupa konsultasi dalam menyerap aspirasi dan prioritas kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat juga belum terlibat dalam kegiatan.
3. Pembuatan keputusan bersama (*deciding together*). Dalam tingkat partisipasi ini, terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Selain berkontribusi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan
4. Melakukan tindakan bersama (*acting together*). Walaupun ada banyak perbedaan dalam yang ditemukan dalam berdiskusi bersama. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan terbaik dan dapat membentuk kolaborasi.
5. Mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat (*supporting independent community*). Tingkat partisipasi ini merupakan tingkat partisipasi tertinggi, dimana masyarakat diberikan kekuasaan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, pada tingkatan ini, masyarakat berperan sangat penting di setiap tahap kegiatan.

Dalam pembangunan partisipatif, pengambil kebijakan mengklaim pengambilan keputusan sudah partisipatif. Namun dalam realitanya klaim tersebut hanya retorika dari pengambil kebijakan, keputusan yang diambil hanya persetujuan mereka dengan para *stakeholder*. Dengan demikian Szentendre dalam (Ali 2007:74) keputusan atau kebijakan yang diambil berkualitas atau tidak dapat diukur dalam lima tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi, yakni:

1. Informasi; merupakan bentuk paling sederhana dalam pembuatan keputusan dengan masyarakat (pengumuman, siaran pers, buletin).

2. Masukan warga; pembuat rencana mengundang warga untuk memberikan komentar atau masukan agar ikut memecahkan masalah (survei, polling, tanggapan tertulis atas draft perencanaan).
3. Konsultasi; terjadi dialog resmi antara perencana dengan masyarakat , untuk ikut memberikan penilaian identifikasi terhadap permasalahan yang ada (pertemuan warga, lokakarya, rembug desa).
4. Perencanaan bersama; keterlibatan warga lebih luas, mulai ada tanggung jawab terhadap perencanaan dan hasilnya, husunya berkaitan dengan persoalan yang cukup rumit (kelompok penasehat, negoisasi, mediasi).
5. Kontrol warga; merupakan tingkatan tertinggi dari partisipasi, biasanya lebih dalam menghadapi persoalan yang benar-benar rumit (referendum setempat).

Wazir (1999) dalam (Ali 2007:72-73) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara partisipatif yakni:

1. Terlibat dalam perencanaan; warga memiliki akses informasi mengenai proses perencanaan pembangunan utuh dan lengkap
2. Terlibat dalam pelaksanaan; warga memiliki akses informasi bagaimana program pembangunan berjalan
3. Terlibat dalam manfaat; warga menerima manfaat langsung segala hasil program pembangunan desa
4. Terlibat dalam evaluasi; warga ikut mengevaluasi proses dan hasil pembangunan, dan turut menentukan kelanjutannya

2.2 Pengelolaan BUM Desa

2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Moekijat (2000:1) pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Balderton dalam Adisasmita (2011:21) pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan Arikunto (1990:2) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.

Dalam bahasa Inggris pengelolaan disebut “*management*” yang artinya pimpinan, pengurusan, pengelolaan. Manajemen menurut Parker (Stoner dan Freeman 2000) seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*The art of getting things done through people*). Begitupun Pat Carigan dalam (Chuck Williams 2001:6) mengatakan bahwa manajemen yaitu menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hampir sama seperti Parker dan Pat Carigan, Sapre (2002) menyatakan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Usman 2013:6).

Bennis (Sharma 2009) dalam (Usman 2013:11) *management is getting people to do what needs to be done*, manajemen adalah menghasilkan karyawan melaksanakan sesuatu yang dibutuhkan untuk dilakukan. Kemudian Drucker menambahkan bahwa manajemen adalah melakukan pekerjaan dengan benar.

G.R. Terry mengartikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Prof. Drs. Oei Liang Lie mengutarakan definisi manajemen bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sabardi 2001:4)

Dijelaskan lebih detail lagi oleh James A.F. Stoner dalam (Sabardi 2001:5-6) bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan terdiri dari beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Sabardi (2001:54) perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dengan dan cara pencapaiannya. Setiap rencana akan memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan perencanaan menurut Handoko (2003) dalam (Usman 2013:77) meliputi (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Harold Koontz dan Cyril O'Donnell (1972:63) perencanaan ialah fungsi memilih sasaran-sasaran perusahaan serta kebijaksanaan, program-program, dan cara-cara untuk mencapainya. Perencanaan dengan sendirinya merupakan suatu pengambilan keputusan

Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis maksudnya agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Lebih jelas lagi, Kamaludin (1989:6) mengutarakan bahwa perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen yakni menentukan tujuan-tujuan dan cara mencapainya. Dengan demikian berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi-definisi perencanaan yakni perencanaan merupakan suatu tahap atau langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan, diawali dengan pengambilan keputusan dalam menentukan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.

Tujuan dari perencanaan: (1) standar pengawasan yakni mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya, (2) mengetahui kapan pelaksanaan dan

selesai suatu kegiatan, (3) mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kualitasnya, (4) mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, (5) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu, (6) memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, (7) menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, (8) mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan (9) mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Manfaat perencanaan yakni (1) standar pelaksanaan dan pengawasan (memfasilitasi monitoring dan evaluasi), (2) pemilihan berbagai alternatif terbaik (pedoman pengambil keputusan), (3) penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan, (4) menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, (5) membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, (6) alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, (7) alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, dan (8) meningkatkan kinerja (keberhasilan organisasi tergantung keberhasilan perencanaannya).

2. Tahap pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Handoko (2003) dalam (Usman 2013:170) pengorganisasian adalah penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Handoko juga menyebutkan bahwa bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatannya, di mana setiap

pengelompokkan diikuti penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok. Ernest Dale dalam (Sabardi 2001:86-88) menguraikan pengorganisasian sebagai suatu proses multistep, yakni:

- a. Pemerincian pekerjaan, memerinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi
- b. Pembagian pekerjaan, membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat menyenangkan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
- c. Pemisahan pekerjaan, mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dalam cara yang logis dan efisien
- d. Koordinasi pekerjaan, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis
- e. Monitoring dan reorganisasi, memonitor efektivitas organisasi dan pengambilan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

3. Tahap pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pengaturan aktivitas-aktivitas organisasi agar elemen-elemen pekerjaan yang menjadi target tetap berada pada batas-batas yang dapat diterima. Tanpa pengaturan ini organisasi tidak memiliki petunjuk tentang seberapa baik kinerja mereka dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Usman 2013:68). Pengawasan berfungsi agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana (Harold Koontz dan Cyril O'Donnell 1972:66).

Sedangkan Sabardi (2001:210) mengutarakan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik.

3.2.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa, yang sering disingkat dengan “BUM Desa” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015. BUM Desa merupakan kelembagaan sosial-ekonomi yang terpisah dari pemerintah desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha ini dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha desa yang dimiliki oleh desa yang keberadaannya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa dan sumber daya manusia desa.

Manfaat dikembangkannya BUM Desa antara lain:

1. Sumber Pendapatan Desa.

BUM Desa dapat menjadi sumber pendapatan desa yang dapat menyumbang kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi terutama jika BUM Desa dikembangkan dengan sistem kepemilikan bersama.

2. Menjadi Aset Desa

BUM Desa dapat menjadi salah satu aset desa yang berwujud lembaga ekonomi. Desa dapat belajar mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui BUM Desa.

3. Kepercayaan

Melalui BUM Desa , desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dan ini dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap desa.

4. Alat Demokratisasi Perekonomian Desa

Melalui pembiayaan secara gotong royong dan kepemilikan bersama, BUM Desa dapat menjadi alat untuk mewujudkan demokratisasi ekonomi di desa (Palupi, dkk., 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa, yakni:

1. Kebutuhan masyarakat utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonom warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Badan usaha desa ini merupakan roda perekonomian desa yang didirikan atas inisiatif masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada tujuh ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
 1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan di kelola secara bersama;
 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan modal masyarakat melalui kebijakan *village policy* (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi di kontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota);

Dalam mendirikan BUM Desa, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh desa, yakni:

1. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
2. Potensi usaha ekonomi desa;
3. Sumberdaya alam di desa;
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan;
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Sebelum mendirikan BUM Desa, terdapat prinsip-prinsip BUM Desa yang harus dipahami, yakni:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
3. Emansipatif, semua komponen terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Cara pendirian BUM Desa yakni (1) pendirian BUM Desa berdasar pada Perda Kabupaten, (2) Diatur berdasarkan Perdes, (3) Satu Desa, hanya terdapat satu BUM Desa, (4) Pemkab memfasilitasi pendirian BUM Desa, (5) BUM Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV atau lembaga keuangan (BPR).

Berikut ini adalah karakteristik dari BUM Desa:

1. Berbentuk Badan Hukum
2. Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan)
3. Modal terdiri dari penyertaan pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%
4. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa

5. Menjadi salah satu sumber pendapatan desa
6. Memberikan layanan bagi masyarakat

2.3 Penelitian terdahulu

1. Penelitian oleh Artha (2018) dalam tesis yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa (Studi Kasus di Desa Larolanu dan Desa Pongkalero)* mengkaji tentang tingkat partisipasi masyarakat desa Larolanu dan Desa Pongkalero. Artha membandingkan tingkat partisipasi antara dua desa tersebut dengan teorinya David Wilcox (1994) tentang *The Theory of Citizen Participation* berdasarkan teori yang sebelumnya telah disusun oleh Arnstein. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Artha dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang partisipasi masyarakat. Perbedaannya, penelitian penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian Artha menggunakan metode kuantitatif-kualitatif.

Hasil dari penelitian Artha menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pongkalero cenderung berpartisipasi lebih baik dibanding masyarakat Desa Larolanu. Masyarakat Desa Pongkalero terlibat dalam perencanaan pelaksanaan dana desa. Mereka juga lebih tinggi tingkat partisipasinya dalam perannya di rapat desa. Hal tersebut terlihat bahwa masyarakat desa Pongkalero lebih leluasa dalam menyampaikan usulan. Pemerintah desa juga cukup responsif dalam menanggapi usulan masyarakat desa Pongkalero. Berbanding terbalik dengan masyarakat Desa Larolanu yang partisipasinya lebih rendah dibanding dengan Desa Pongkalero sebab rendahnya tingkat pengetahuan tentang penganggaran dana desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahzar (2017) dalam tesis yang berjudul *Konfigurasi partisipasi masyarakat desa (Studi kasus proses pendirian BUMDes di Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta)* mengkaji tentang partisipasi masyarakat terhadap BUMDes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih didominasi oleh segelintir orang. Mulai dari purnagkat desa, kelompok dan komunitas. Kelompok yang berbasis pertanian, kerajinan, kelompok tanggap bencana, kelompok karang taruna, kelompok perempuan. Partisipasi publik dalam rangka pembentukan BUM Desa di Wukirsari masih sangat rendah. Kadar partisipasi di Desa Wukirsari dalam tangga partisipasi Arnstein masuk dalam golongan *tokenisme*. Ada oknum pemerintah desa yang 'nakal' dengan sengaja memonopoli akses dan ruang partisipasi dengan tujuan hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu atau kelompok masyarakat yang bisa diajak kompromi. Persamaan penelitian Mahzar dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji tentang partisipasi masyarakat. Perbedaannya hasil dari penelitian Mahzar, partisipasi masyarakat terhadap BUM Desa masih sebatas *tokenisme*, dan penelitian penulis partisipasi masyarakat sudah dalam tahap partisipasi *citizen power* berupa *partnership* (kerjasama).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meray, Tilaa, dan Takumansang (2017) dalam artikel yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas* menganalisis tentang partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

pengembangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitiannya penulis adalah sama-sama tentang partisipasi masyarakat dan perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-kualitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 30 orang responden dengan presentase 100% menyadari bahwa pengembangan kawasan pantai Mahembang menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan masyarakat. Partisipasi masyarakat kawasan pantai Mahembang dapat diklasifikasikan dalam tingkat partisipasi tenaga (insentif), keterampilan dan kemahiran (inisiatif), dan buah pikiran (interaktif)

4. Penelitian Nofiratullah (2018) dalam skripsinya yang berjudul *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Boko Kabupaten Bima* mengkaji mengenai BUM Desa yang ada di Desa Soki. Tentang dampak yang ditimbulkan melalui keberadaan BUM Desa tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah mengkaji BUM Desa dalam sebuah desa dan kebermanfaatannya yang diberikan oleh BUM Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Perbedaan penelitian Nofiratullah mengkaji tentang eksistensi BUM Desa dan penelitian peneliti mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam BUM Desa. Poin pentingnya, kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang BUM Desa.

5. Penelitian Sapei (2015) dalam skripsinya yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang* mengkaji tentang partisipasi

masyarakat di desa pesisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan dalam program pengembangan desa pesisir tangguh. Penelitian Sapei menggunakan metode kualitatif guna untuk mengetahui fakta sebenarnya di lapangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam suatu program atau kegiatan, bagaimana masyarakat turut terlibat dalam kegiatan tersebut mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam tahap perencanaan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Pada tahap pelaksanaan adanya partisipasi dari masyarakat dalam bentuk tenaga dan materi. Tahap pengawasan, masyarakat masih kurang terlibat mengawasi kegiatan dalam program PDPT. Tahap pemanfaatan dan pemeliharaan, masyarakat secara luas sangat merasakan manfaat namun untuk pemeliharaan masyarakat masih kurang terlibat. Perbedaannya, penelitian penulis mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa.

6. Penelitian Wahyudin (2018) dalam penelitian skripsi yang berjudul *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa* mengkaji tentang partisipasi masyarakat. Wahyudin melakukan analisis seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Tanah Karaeng. Analisis partisipasi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan evaluasi/monitoring, dan

pemanfaatan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling*.

7. Penelitian Tiballa (2017) dalam artikel yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur* mendeskripsika tentang partisipasi masyarakat dalam BUM Desa. Penelitian ini menguraikan tentang faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini disebutkan pula tentang partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program-program dari BUM Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian deksriptif kualitatif.
8. Penelitian oleh Martina (2017) dalam skripsi yang berjudul *Perencanaan Partisipatif dengan Menggunakan Model Clear di Kota Serang Provinsi Banten* mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan menggunakan model CLEAR. Persamaan penelitian Martina dengan penelitian skripsi penulis terletak pada pengkajian partisipasi masyarakat.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Kasila (2017) dalam skripsi yang berjudul *Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDes Tirta Mandiri* menganalisis tentang partisipasi pemuda dalam BUMDes Tirta Mandiri. Tingkat partisipasi pemuda desa diukur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan didukung kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda desa dalam BUM Desa Tirta Mandiri berada pada

kategori sedang dengan partisipasi tertinggi berada pada tahap pelaksanaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda desa Ponggok adalah tingkat komunikasi.

2.4 Kerangka Berpikir

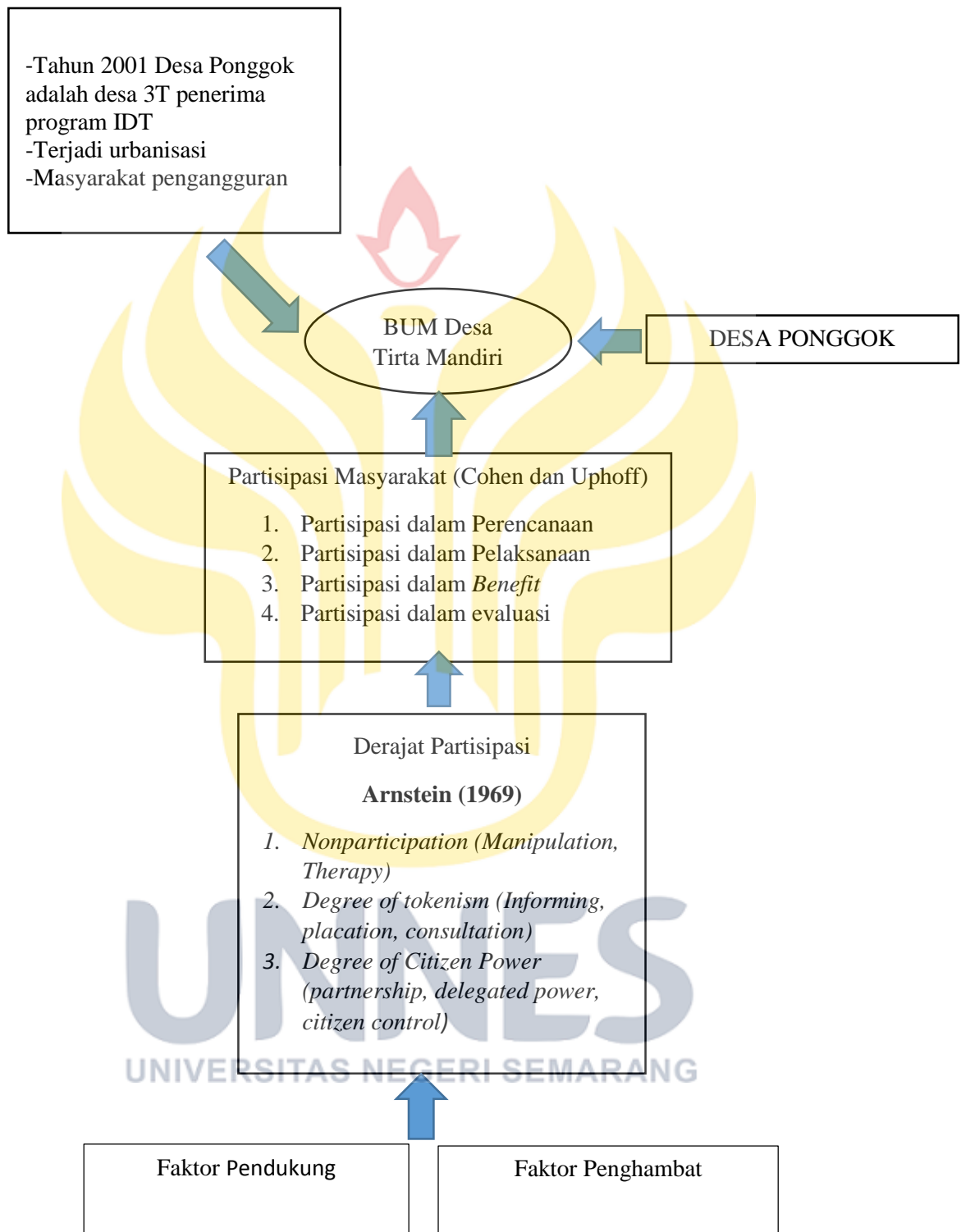
Dalam penelitian ini peneliti hendak meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tirta Mandiri didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Ponggok. Pada tahun 2001, desa ponggok merupakan desa yang masuk dalam kategori 3T dan mendapatkan program IDT dari pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan karena masyarakat Desa Ponggok banyak yang menjadi pengangguran dan pergi merantau ke kota. Namun demikian, Desa Ponggok kemudian berubah menjadi desa mandiri setelah pemerintah desa bersama masyarakat dapat mengelola potensi dan aset yang ada di desa.

Pada tahun 2012, diketahui bahwa Desa Ponggok memiliki potensi air yang melimpah. Ada banyak sumber air yang tidak dimanfaatkan dengan baik, salah satunya sumber mata air Umbul Ponggok. Berangkat dari penemuan ini, pemerintah desa bersama masyarakat berupaya mengembangkan sumber air untuk dijadikan wisata air. Dengan demikian, Desa Ponggok menjadi terkenal dengan obyek wisata airnya yakni Umbul Ponggok.

Kehadiran BUM Desa juga menjadi wadah bagi masyarakat dalam memulai kembali kegiatan ekonomi desa. Selain Umbul Ponggok, ada beberapa

unit usaha yang dikelola BUM Desa Tirta Mandiri. Seperti unit usaha Wedding Organizer dan catering, unit usaha.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak membatasi penelitian pada tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini penting menurut peneliti sebab melihat latar belakang Desa Ponggok yang pada tahun 2001 pernah menjadi Desa 3T. Sehingga begitu menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam pengelolaan BUMDesa Tirta Mandiri. Dalam kajian ini, peneliti hendak menggunakan teori dari Arnstein (1969) tentang derajat/tingkat partisipasi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri (Studi Kasus Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) dan faktor yang mempengaruhinya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat diketahui partisipasi masyarakat terhadap BUM Desa Tirta Mandiri melalui kegiatan-kegiatan usaha yang bersinergi dengan Pokdarwis dan Kelompok UKM berada pada tangga *citizen power* berupa *partnership* dan *delegated power*. Untuk kegiatan usaha: 1) pengelolaan Umbul Ponggok partisipasi berupa *partnership* (kerjasama); 2) pengelolaan kegiatan usaha studi desa partisipasi berupa *delegated power*; 3) pengelolaan perikanan partisipasi berupa *partnership* (kerjasama); 4) pengelolaa *event organizer* partisipasi berupa *partnership* (kerjasama), 5) program 1 kk 5 juta partisipasi berupa *delegated power*.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap BUM Desa Tirta Mandiri: usia, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan lama tinggal. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kuat tidaknya partisipasi mereka terhadap kendala tersebut. Dapat diketahui pula, dalam hal ini masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok masyarakat: pokdarwis dan kelompok UKM, mereka belum benar-benar mengetahui BUM Desa. Masyarakat hanya sebatas memiliki pengetahuan bahwa kehadiran BUM Desa memberikan manfaat

kepada mereka. Sehingga keinginan mereka untuk terlibat di BUM Desa masih rendah. Padahal untuk melakukan keberlanjutan dalam pengelolaan BUM Desa, begitupun dengan sinerginya bersama pokdarwis dan kelompok UKM, membutuhkan kebaruaran kegiatan bersama. Hal ini dilakukan agar keberlanjutan pembangunan ekonomi dan lingkungan mampu terjaga, sehingga kebermanfaatannya bukan hanya untuk generasi sekarang namun juga mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan analisis pada bab sebelumnya dan hasil kesimpulan, maka perlu adanya masukan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Ponggok terhadap BUM Desa pada masa mendatang. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa rekomendasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan yakni:

1. Kondisi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan usaha BUM Desa Tirta Mandiri adalah mereka yang tidak tergabung dalam kelompok masyarakat: pokdarwis dan kelompok UKM dikarenakan masyarakat yang tidak mau mencoba untuk terlibat dalam kegiatan yang ada dan hanya mengambil manfaat. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan dari pemerintah desa untuk menumbuhkan keinginan dan kemampuan masyarakat desa yang belum tergabung dalam kelompok masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dan berinovasi dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan usaha

BUM Desa yang berfokus pada pengelolaan potensi sumber daya desa, potensi ekonomi desa, dan pelayanan masyarakat desa..

2. Pemerintah desa dan pihak BUM Desa Tirta Mandiri perlu mengembangkan iklim yang transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan-kegiatan usaha BUM Desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu lebih gencar menciptakan ruang-ruang informal yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang di hadapi. Dengan menyesuaikan kondisi masyarakat, maka masyarakat dapat lebih nyaman dalam menyampaikan ide dan gagasan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengalami proses belajar sosial dari kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agusta, Ivannovich, dan Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang: Averroes Press
- Amien, A. Mappadjantji. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Anwas, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Chuck Williams. 2001. *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Harold Koontz dan Cyril O'Donnell. 1972. *Prinsip-Prinsip Management: Suatu Analisa dari Fungsi-Fungsi Kepemimpinan*. Jakarta: Bhatara
- Hofsteede. 1994. *Pembangunan Masyarakat: Kumpulan Karangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- I Nyoman Beratha. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- J, Erika. 2014. *Mengenal Tradisi Wilayah Sebagai Potensi Daerah*. Surakarta: CV Aryaeko Sinergi Persada
- Kamaluddin. 1989. *Manajemen*. Padang: Jurusan Pendidikan Dunia Usaha FPIPS IKIP Padang
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa : Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Penerbit Jurusan Ilmu Pemerintah UNDIP
- Kusnaedi, dkk. 1995. *Membangun Desa; Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*. Jakarta: PT Penebar Swadaya
- Nawawi, H. Hadari, 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

- Pristiyanto. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu
- Rustanto, Bambang. 2016. *Masyarakat Multikultur di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sabardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Santana K., Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pusataka Obor
- Saragi, Tumpal P., 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT INDEKS
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soetomo. 2008. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- _____. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Sulistiyani, Teguh Ambar. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Sutoro, Eko., dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FFPD)
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wiratmoko, Nick T., Dirdjosanjoto, Pradjarta, dan Suwondo, Kutut. 2004. *Yang Pusat dan Yang Lokal: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber dari Jurnal:

- David, Wilcox. 1994. *Community Participation and Empowerment*. New York: Joseph Rowntree Foundation
- Kasila, Morni., dan Kolopaking, Lala M., 2018. 'Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUM Desa "Tirta Mandiri" (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)'. *Jurnal Institut Pertanian Bogor*

- Meray, Jose Geraldly. 'Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas'. Jurnal Spasial. Universitas Sam Ratulangi
- Meray, Josie Geraldly., dkk. sit - . 'Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Nancy Roberts. 2004. 'Public Deliberation in An Age of Direct Citizen Participation'. Naval Postgraduate School
- Palupi, Sri, dkk. 2016. 'Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak'. Jakarta: Lakpesdam PBNU
- Tiballa, Ryanti. 2017. 'Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur'. Jurnal Universitas Mulawarman
- Waheduzzaman. 2010. 'Value of People's Participation for Good Governance in Developing Countries'. School Of Management and Information System, Victoria University. 386-402
- Wedchayano, Nisada, and Chorkaew, Sunisa,. 2014. 'The Sufficiency Economy dan People-Centered Development'. National Institute of Development Administration, Thammasat University

Sumber dari Skripsi dan Tesis:

- Ardian Artha. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Larolanu Dan Desa Pongkalero). Tesis. Pasca Sarjana Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada
- Imamuddin, Moh. 2018. 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Mahzar, Syahrizaan Al. 2017. Konfigurasi Partisipasi Masyarakat Desa (Studi Kasus Proses Pendirian Bumdes Di Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, Di Yogyakarta. Tesis. Program Pasccasarjana. Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada
- Martina, Vevi. 2018. 'Perencanaan Partisipatif dengan Menggunakan Model *Clear* di Kota Serang Provinsi Banten'. *Skripsi*. Untirta
- Nisrina, Ariz. 2018. 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembang Objek Wisata dan Margotirto di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung

- Nofiratullah. 2018. 'Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Beko Kabupaten Bima'. *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah. UIN Maulana Malik Ibrahim
- Nurdiyanto, Sigit. 2015. 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi di Desa Wisata Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul'. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sapei, Abdulah. 2015. 'Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang'. *Skripsi*. Untirta
- Wahyudin. 2018. 'Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa'. *Skripsi*. Universitas Alauddin Makassar

Sumber dokumen:

- Perdes No. 6 Tahun 2009 Tentang BUM Desa Tirta Mandiri
AD/ART BUM Desa Tirta Mandiri 2018
- Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/26/pissvc383-kemendes-jumlah-BUM-Desa-mencapai-41-ribu-unit>, diakses tanggal 12 Februari 2019
- <https://regional.kompas.com/read/2018/12/22/11423271/jokowi-desa-pongok-bisa-jadi-contoh-pendapatannya-rp-14-miliar-per-tahun>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019
- https://www.youtube.com/watch?v=G_fLqM33XAs Kemendes PDPT. 2017. Kisah Sukses Desa Pongok dalam mengembangkan bumdes. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019
- <https://www.youtube.com/watch?v=DtbUNcTaiwQ> Mata Najwa. 2018. Mata Najwa - Manusia-Manusia Kuat: Kades Pongok Sulap Desa Jadi Kaya (Part 2). Diakses pada tanggal 14 Februari 2019